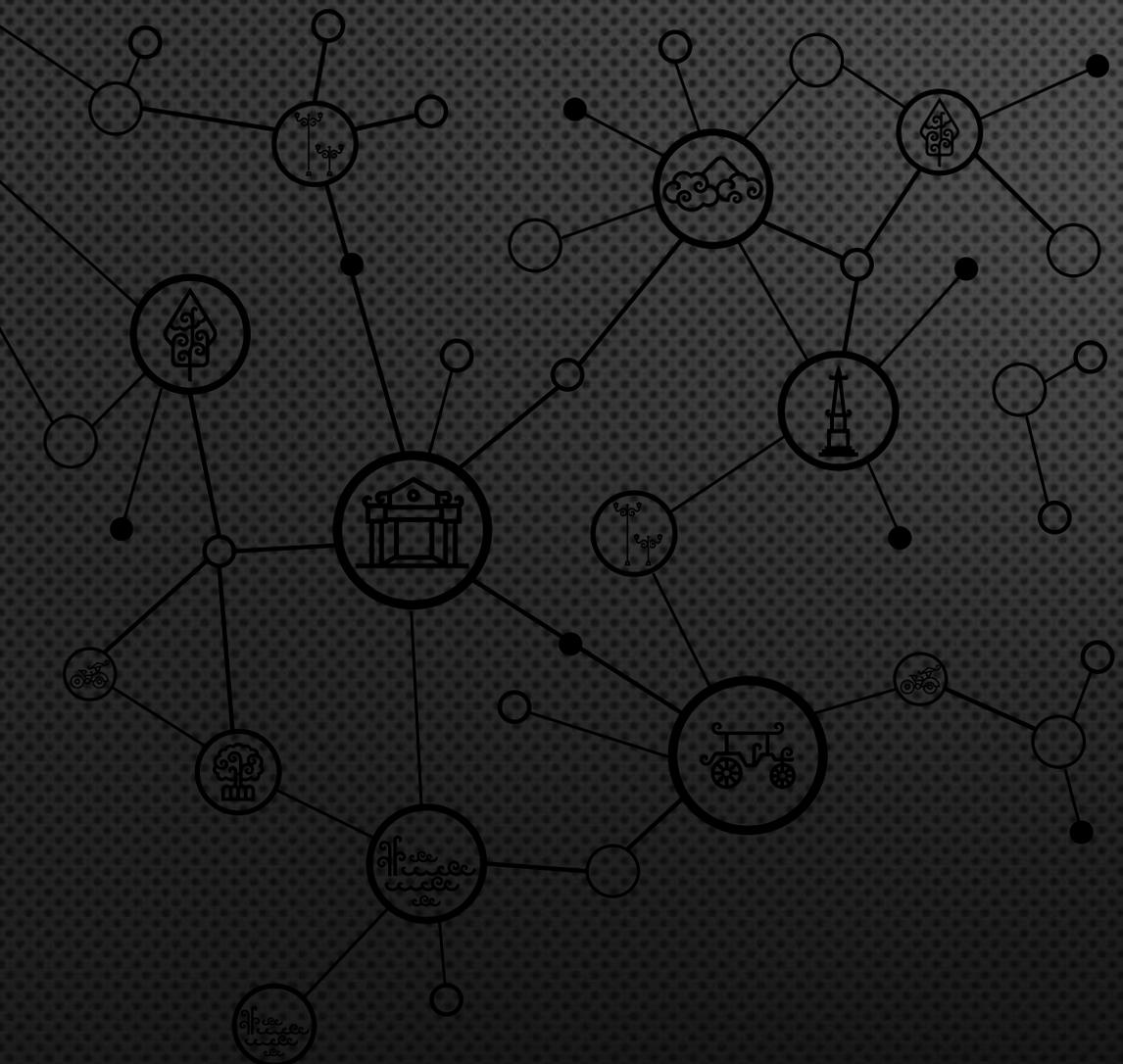


# Ekspose

## Hasil Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan I TA 2019

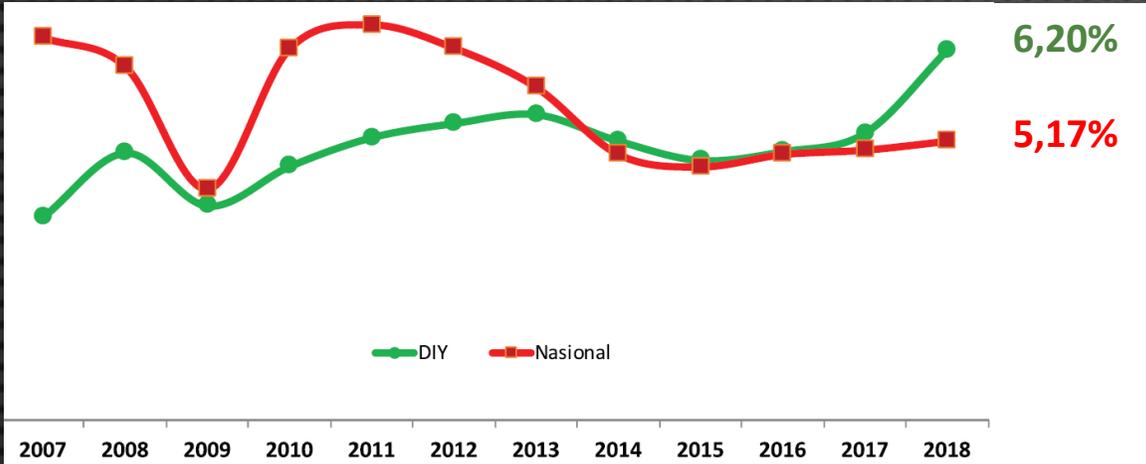
---

Yogyakarta, 25 April 2019



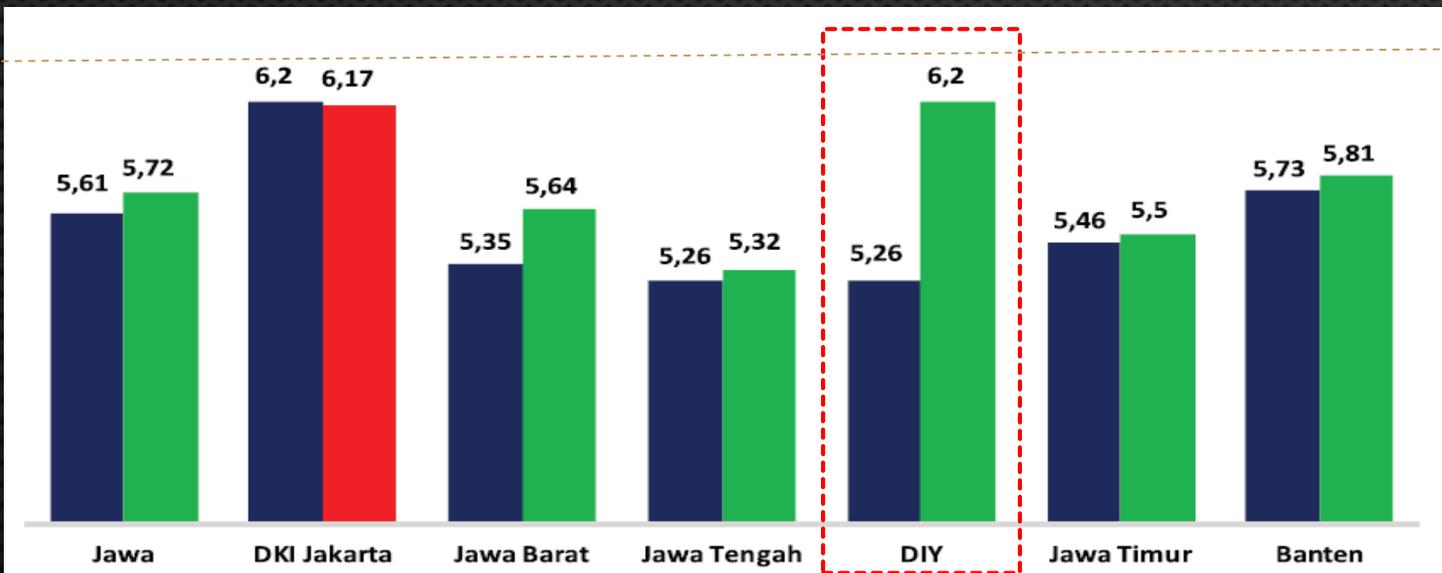
# Kinerja Pembangunan Daerah

# Kinerja Perekonomian Pada Tahun 2018



- Pertumbuhan ekonomi DIY pada 2018 sebesar 6,2 % (meningkat 0,94 poin dibandingkan 2017)
- Pertumbuhan ekonomi DIY adalah yang tertinggi dibandingkan wilayah lain di Jawa (5,72%) maupun secara nasional (5,17%)
- Komponen yang menyebabkan tingginya pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan investasi dan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur strategis (bandara NYIA, jalan JLS, jalan tembus GK-Sleman) yang berimbas pada pertumbuhan sektor konstruksi

## Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Wilayah Lainnya di Jawa pada 2017 & 2018



Selain investasi, lapangan usaha yang tumbuh pesat adalah sektor informasi dan komunikasi. Pesatnya layanan belanja online melalui telepon pintar ditengarai menjadi pendongkrak dinamisnya lapangan usaha tersebut. Pasar sudah berubah !

# Potret Inflasi Pada 2018

## Banten

3,42% (2018)  
3,98% (2017)

## DKI

3,27% (2018)  
3,72% (2017)

## Jateng

2,82% (2018)  
3,71% (2017)

## Jabar

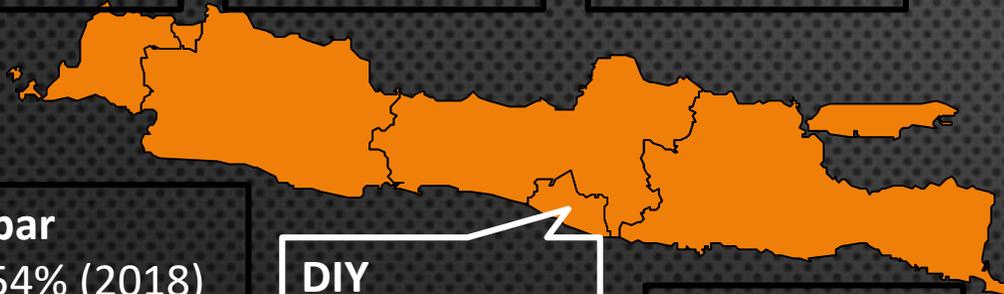
3,54% (2018)  
3,63% (2017)

## DIY

2,66% (2018)  
4,20% (2017)

## Jatim

2,86% (2018)  
4,04% (2017)



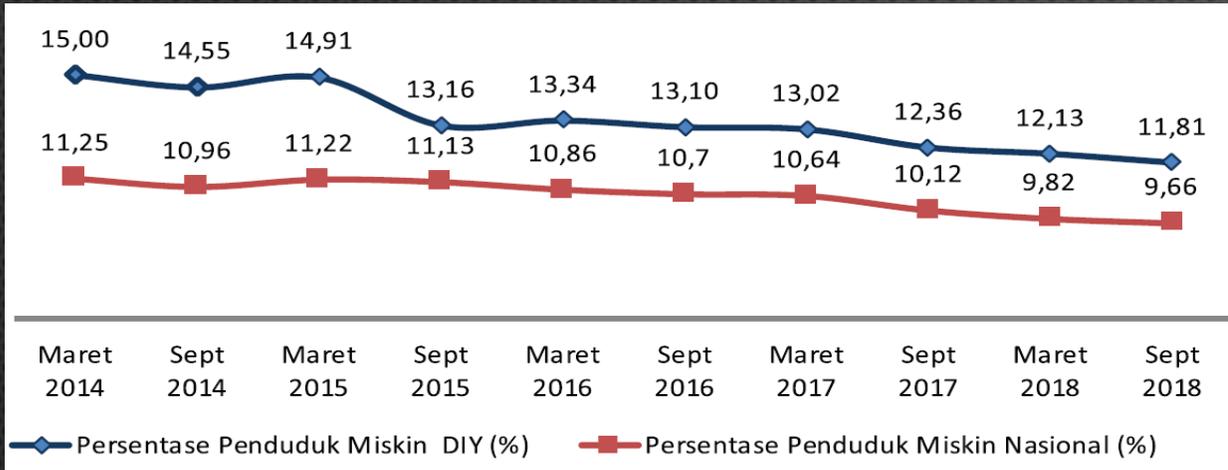
- Inflasi DIY pada 2018 relatif stabil, bahkan yang terendah di Jawa maupun Nasional
- Hal ini menunjukkan upaya pengendalian harga di DIY cukup efektif, di tengah laju dinamika pertumbuhan ekonomi (peningkatan sektor pariwisata, jasa, perdagangan, dan investasi)



- Dukungan TPID dalam pengendalian inflasi patut diapresiasi
- Pada 2019, harus diantisipasi potensi peningkatan laju inflasi pada periode seperti : Bulan Puasa/Lebaran 2019, liburan sekolah, kenaikan gaji ASN, dan liburan Natal

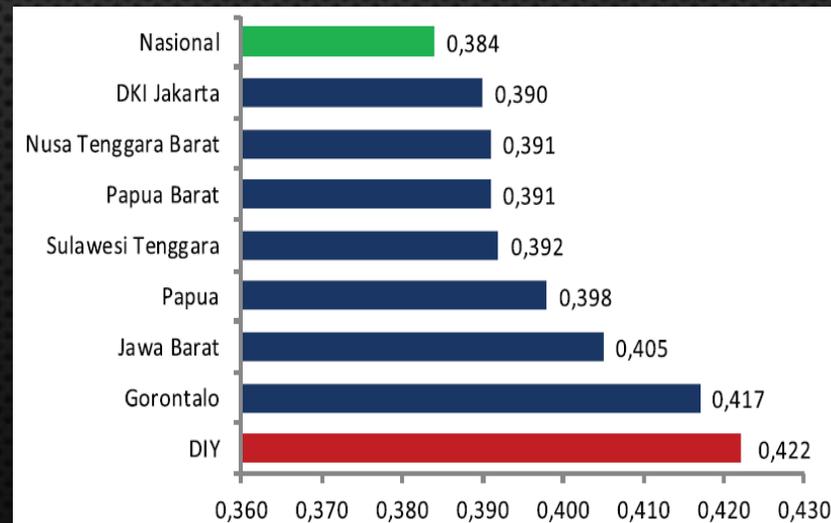
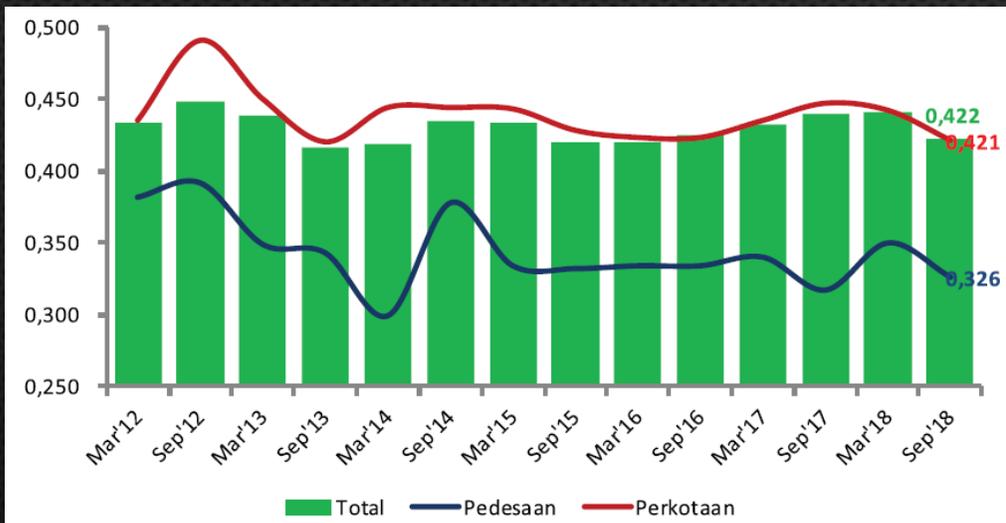
# Kemiskinan & Ketimpangan

## Potret kemiskinan di DIY dan Nasional pada 2014 – 2018 :



- Tingkat kemiskinan di DIY (11,81%) cenderung turun, meskipun masih diatas rerata Nasional (9,66%), pada 2018
- Secara spasial, jumlah penduduk miskin di DIY terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Pada Sept. 2018 jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 298,47 ribu orang atau 66,29% dari total jumlah penduduk miskin di DIY.
- Meskipun demikian, scr persentase, jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Sebanyak 14,71% penduduk di pedesaan berada di bawah garis kemiskinan.

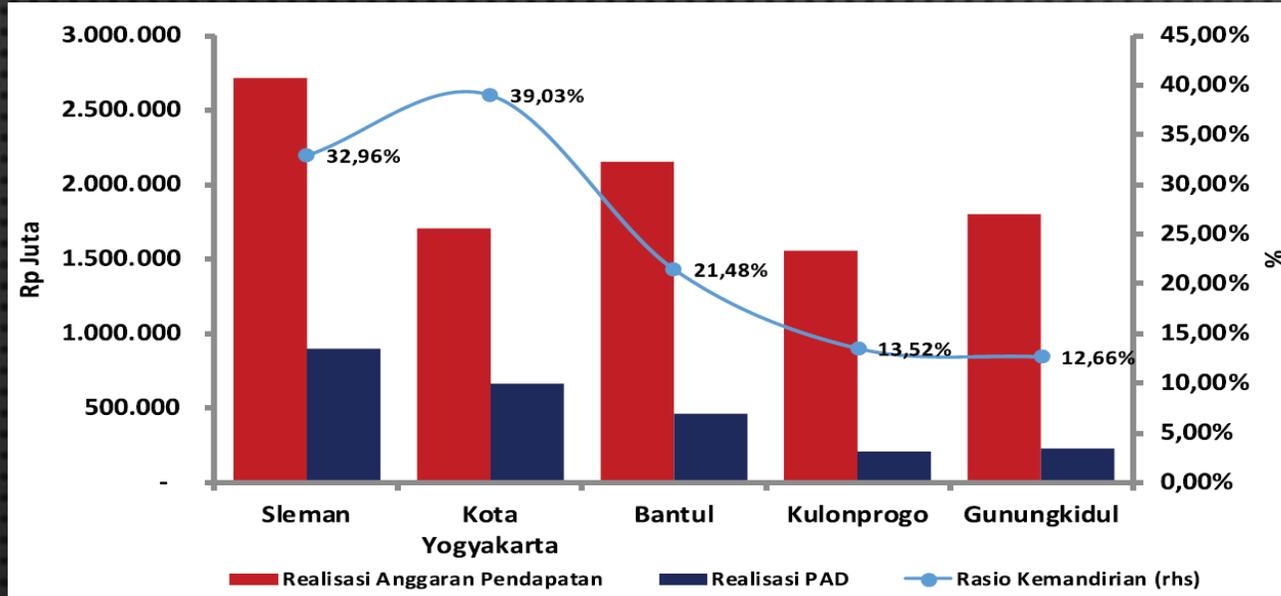
## Potret ketimpangan pendapatan :



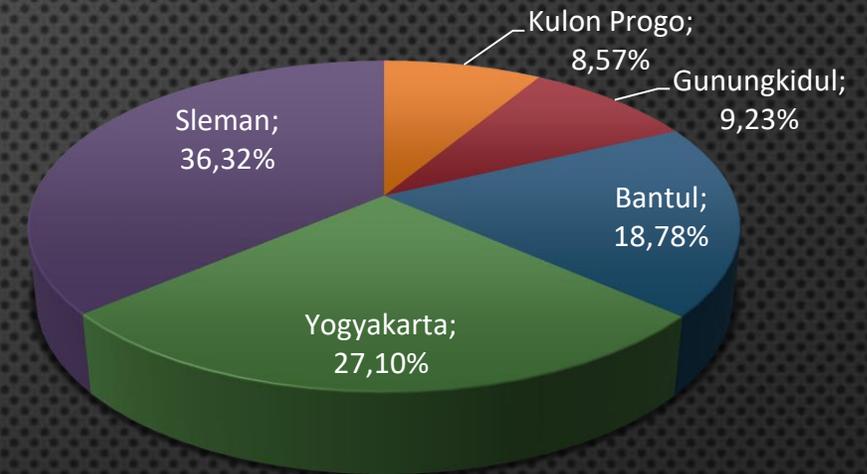
- Meskipun ketimpangan pendapatan DIY masih cukup tinggi (2018), tetapi capaiannya sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

# Potret Kapasitas APBD Kabupaten/Kota Pada 2018

## Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kab/Kota pada 2018 :



## Proporsi realisasi PAD Kab/Kota pada 2018 :



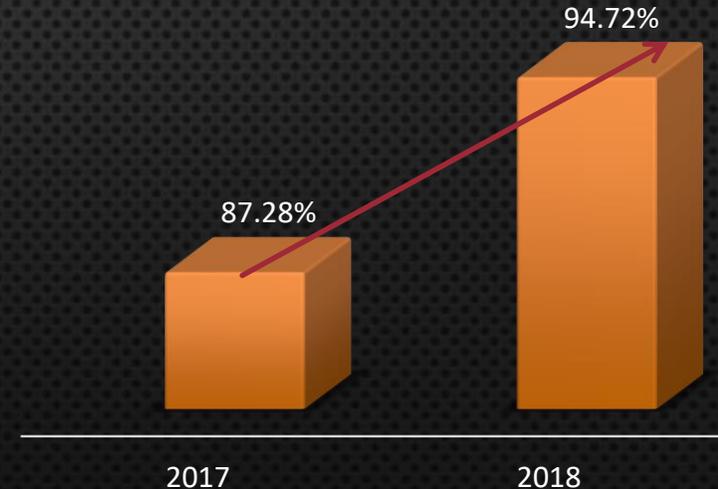
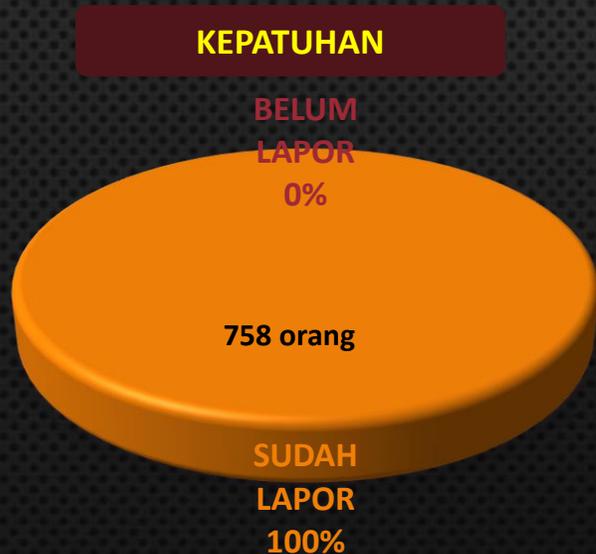
- Berdasarkan kemampuan daerah untuk memperoleh pendapatan yang bersumber dari sumber daya yang dimiliki, Kota Yogyakarta menjadi daerah yang paling mandiri diantara Kab/Kota lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh derajat otonomi fiskal (DOF) Kota Yogyakarta yang paling tinggi, dengan DOF sebesar 39,03%. Sementara itu, Kab. Gunungkidul memiliki DOF terkecil (12,66%),
- Secara keseluruhan, seluruh Kabupaten/ Kota di DIY perlu melakukan upaya untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi serta pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satu optimalisasi pajak dan retribusi yang dapat dilakukan adalah dari industri pariwisata, yang merupakan salah satu potensi di DIY.

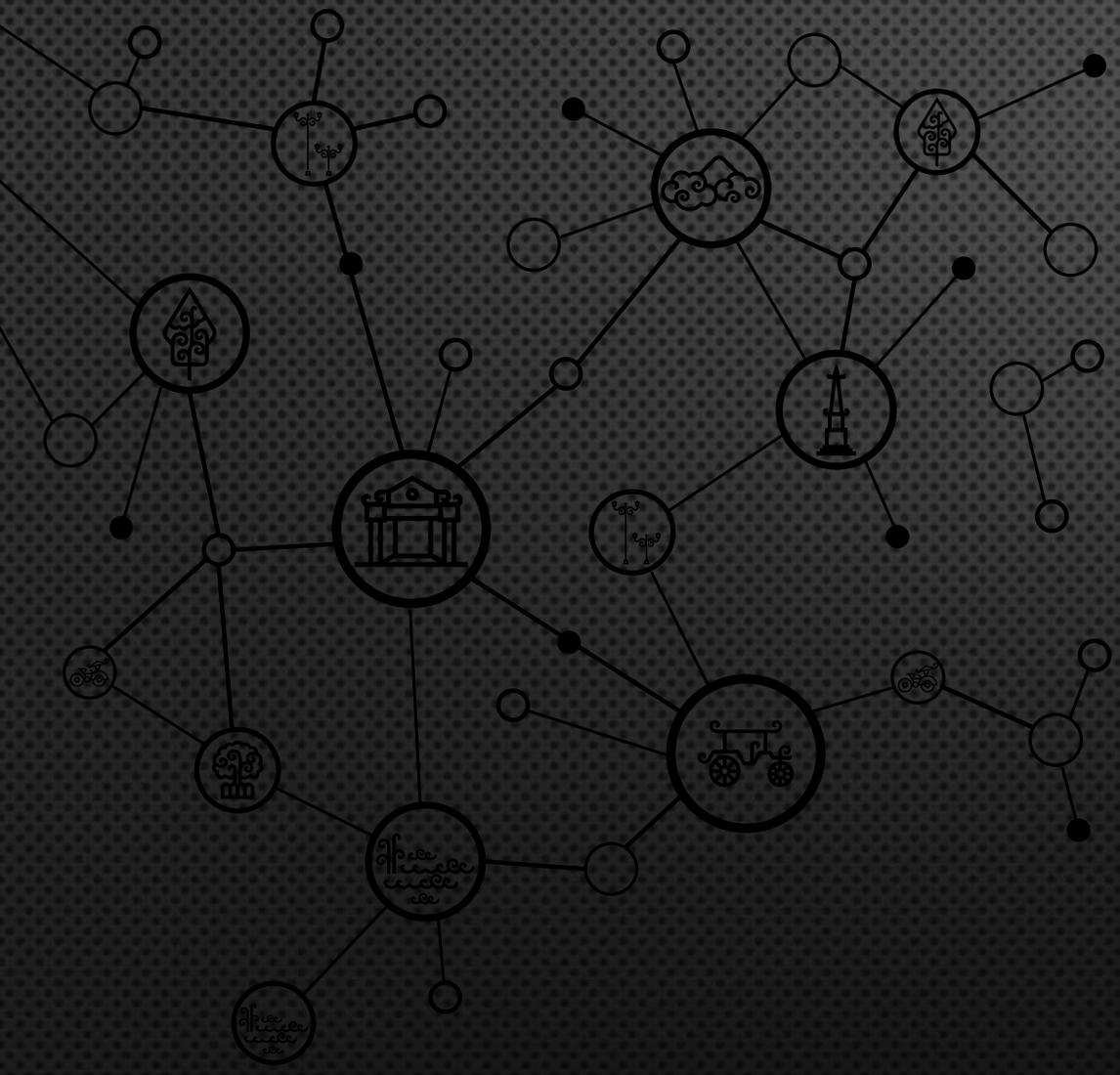
# Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Pemda DIY

KEPATUHAN	2018		2017	
	ORANG	%	ORANG	%
Wajib Lapor	758	100	841	100
Sudah Lapor	758	100	841	100
Tepat Waktu	718	94.72	734	87.28
Terlambat	40	5.28	107	12.72
Belum Lapor	0	0	0	0

- Untuk tahun pelaporan 2018, tingkat keterlambatan Penyelenggara Negara mengalami penurunan sebesar 7,28% (dibandingkan pelaporan tahun 2017 sebesar 12,72%)
- Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara di Pemda DIY dalam menyampaikan laporan harta kekayaan, semakin baik

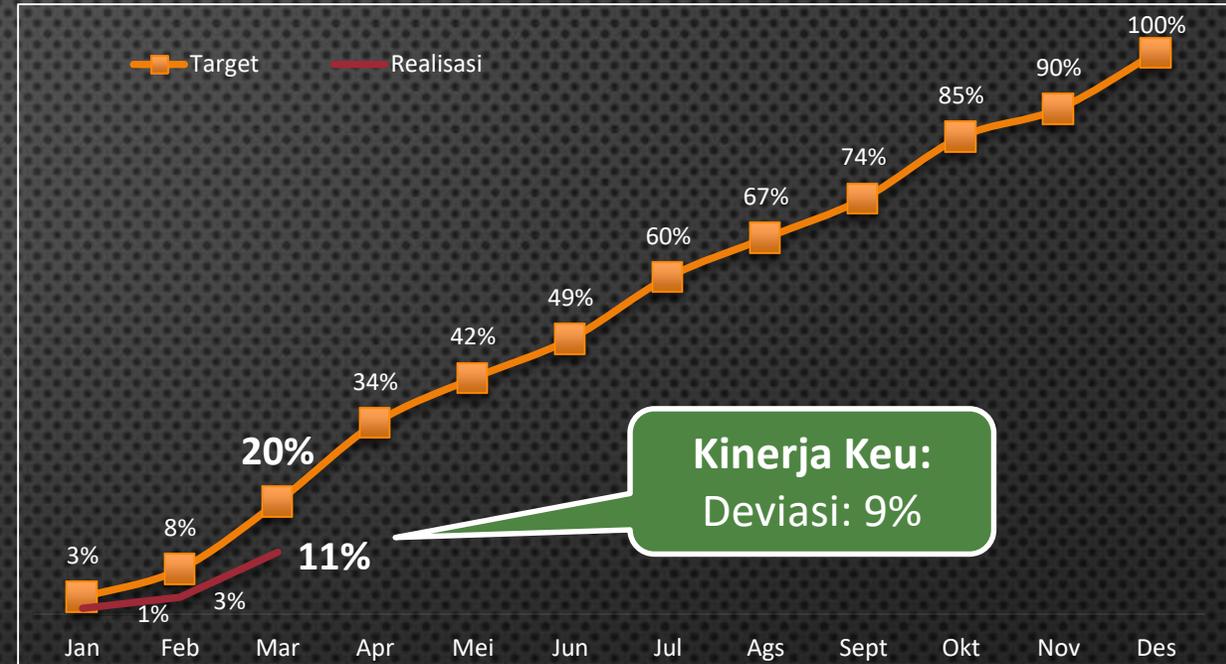
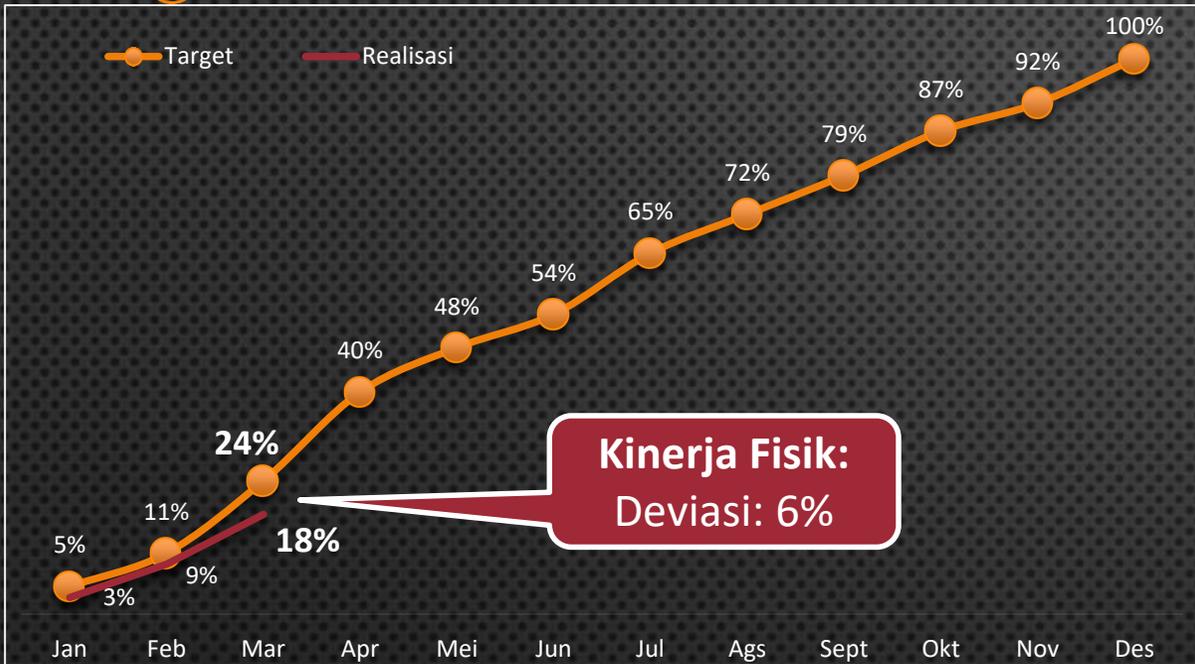
Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan pada 2017 & 2018 :





# Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2019

# Kinerja Fisik & Keuangan Belanja Langsung s.d. Tw I Tahun 2019

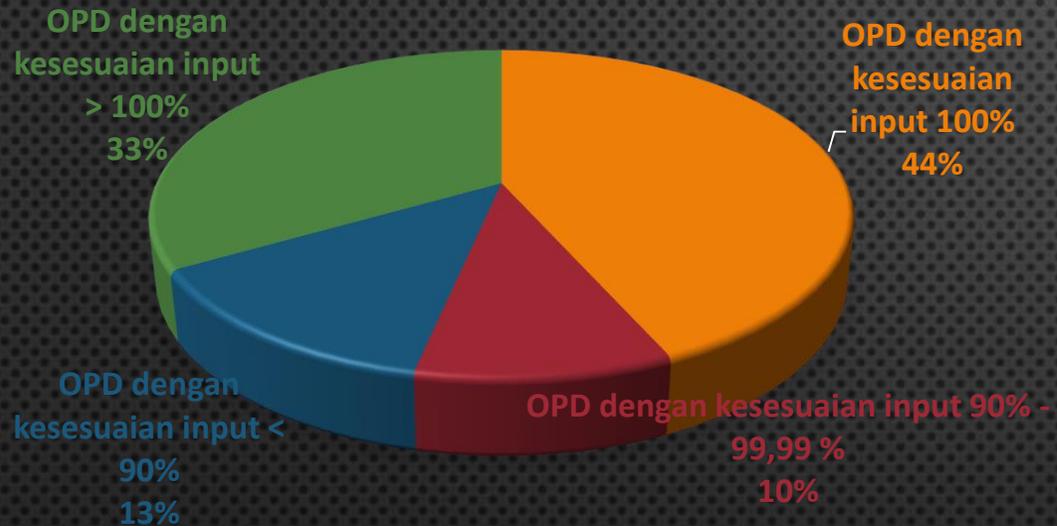


## Realisasi Kinerja Fisik dan Keuangan Triwulan I TA 2015 – 2019 :



- Faktor yang menyebabkan gap pada kinerja fisik : penyesuaian pelaksanaan (mundur) ke pada TW II, keterlambatan realisasi BOS sektor pendidikan, dan belum terbitnya juknis DAK dari K/L
- Faktor yang menyebabkan gap pada kinerja keuangan : keterlambatan proses administrasi SPj, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan

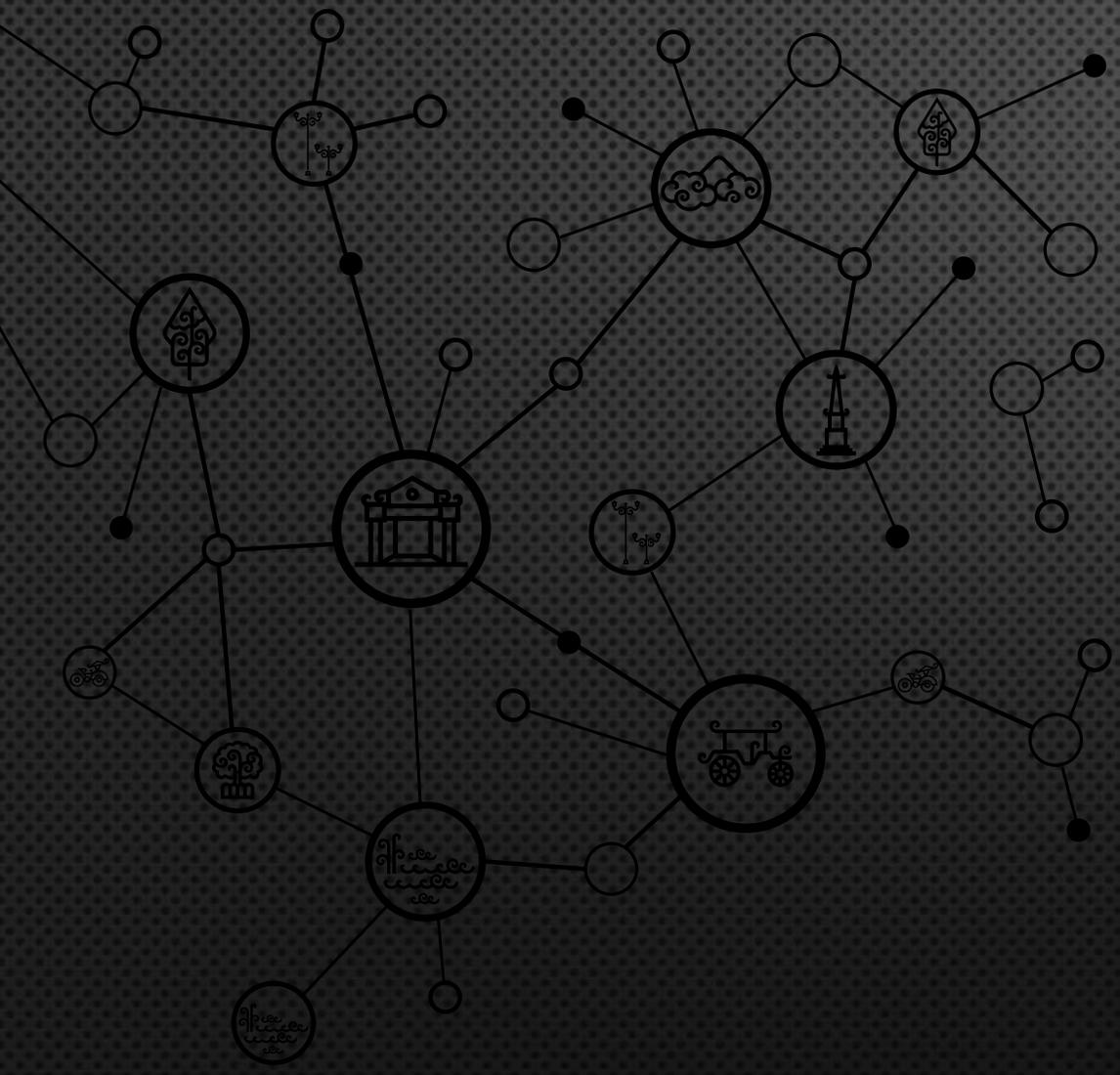
Diagram Progress Input RUP OPD DIY TA 2019



- Perlunya kecermatan OPD dalam menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) agar fungsi pengendalian dapat dioptimalkan
- Sekurangnya, terdapat 5 OPD yang belum sepenuhnya melaporkan RUP (Rencana Umum Pengadaan) 2019 secara optimal, yakni : **BPBD, Disdikpora, Dispertaru, Dinas Kebudayaan, dan Badan Penghubung Daerah**

N o.	Jenis Pengadaan	Jumlah Paket Total	Jumlah Paket Masuk	Jumlah Paket Selesai Lelang	Jumlah Pagu Paket Seluruhnya	Jumlah Pagu Paket Masuk	Jumlah Pagu Paket Selesai lelang
1	Barang	151	62	40	165,613,106,882	77,677,022,830	53,107,201,000
2	Jasa Lainnya	144	116	106	84,391,317,737	66,367,649,743	60,767,964,743
3	Konstruksi	124	36	12	437,281,477,525	159,416,060,800	50,444,772,000
4	Jasa Konsultasi	170	83	29	55,943,346,761	27,655,778,200	7,449,031,000
Jumlah Total		589	297	187	743,229,248,905	331,116,511,573	171,768,968,743

- Jumlah paket selesai lelang sampai dengan TW I 2019, sebanyak 187 paket atau 63 % dari total paket yang masuk. Paket yang selesai lelang didominasi paket jasa lainnya
- Perlunya percepatan pelaksanaan PBJ, terutama terhadap paket jasa konstruksi yang sudah masuk atau yang belum, seperti :
  - 1) Pembangunan Gedung Pameran Museum Sonobudoyo, senilai Rp 35,7 M
  - 2) Peningkatan Ruas Jalan Klangon-Tempel, senilai Rp 19,6 M
  - 3) Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan, senilai Rp 18 M
  - 4) Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Kaliurang Simpang MM UGM, senilai Rp 5 M
  - 5) Pembangunan Tanggul Penahanan Dinding TPST Piyungan, senilai Rp 3,5 M

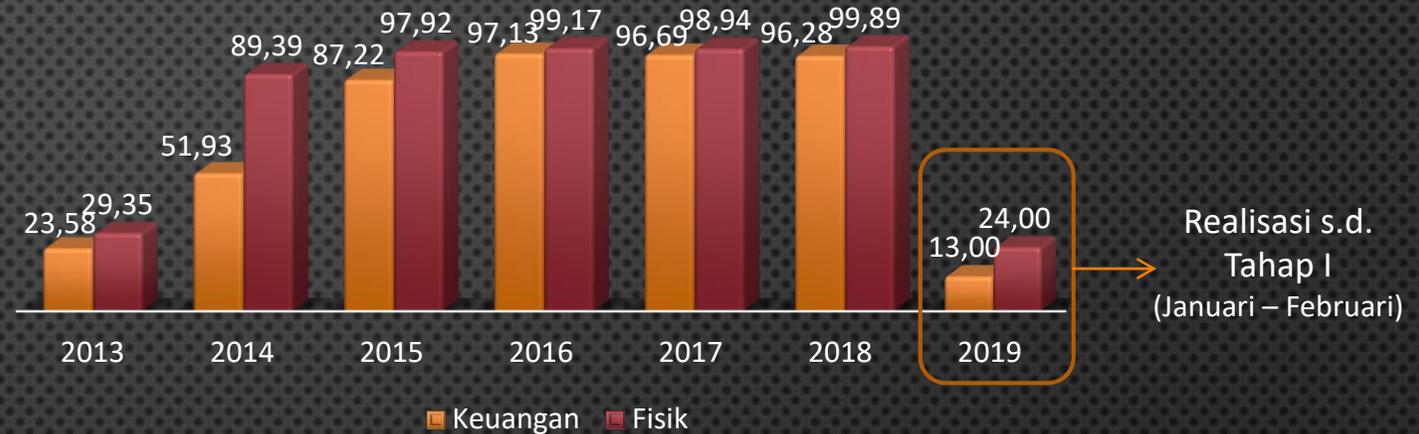


# Kinerja Pelaksanaan Anggaran Keistimewaan

# Perkembangan Realisasi Keuangan & Fisik 2013-2019

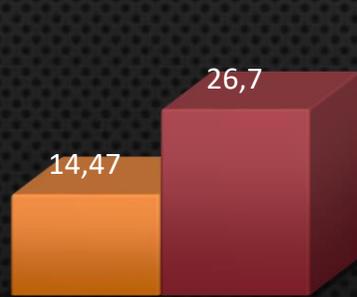
Tahun	Total Pagu	Realisasi Keuangan
2013	231.392.635.500	54.562.180.053
2014	523.874.719.000	272.056.608.289
2015	547.450.000.000	477.494.515.166
2016	547.450.000.000	531.722.397.752
2017	800.000.000.000	773.503.063.972
2018	1.000.000.000.000	962.772.688.443
2019*	1.200.000.000.000	150.670.396.664

\* Realisasi s.d. Tahap I (Januari – Februari)



## Realisasi Dana Keistimewaan TW I/2019

### Total Dana Keistimewaan



Triwulan I

Keuangan Fisik

### Per Urusan Keistimewaan



Urusan Kelembagaan

Urusan Kebudayaan

Urusan Pertanahan

Urusan Tata Ruang

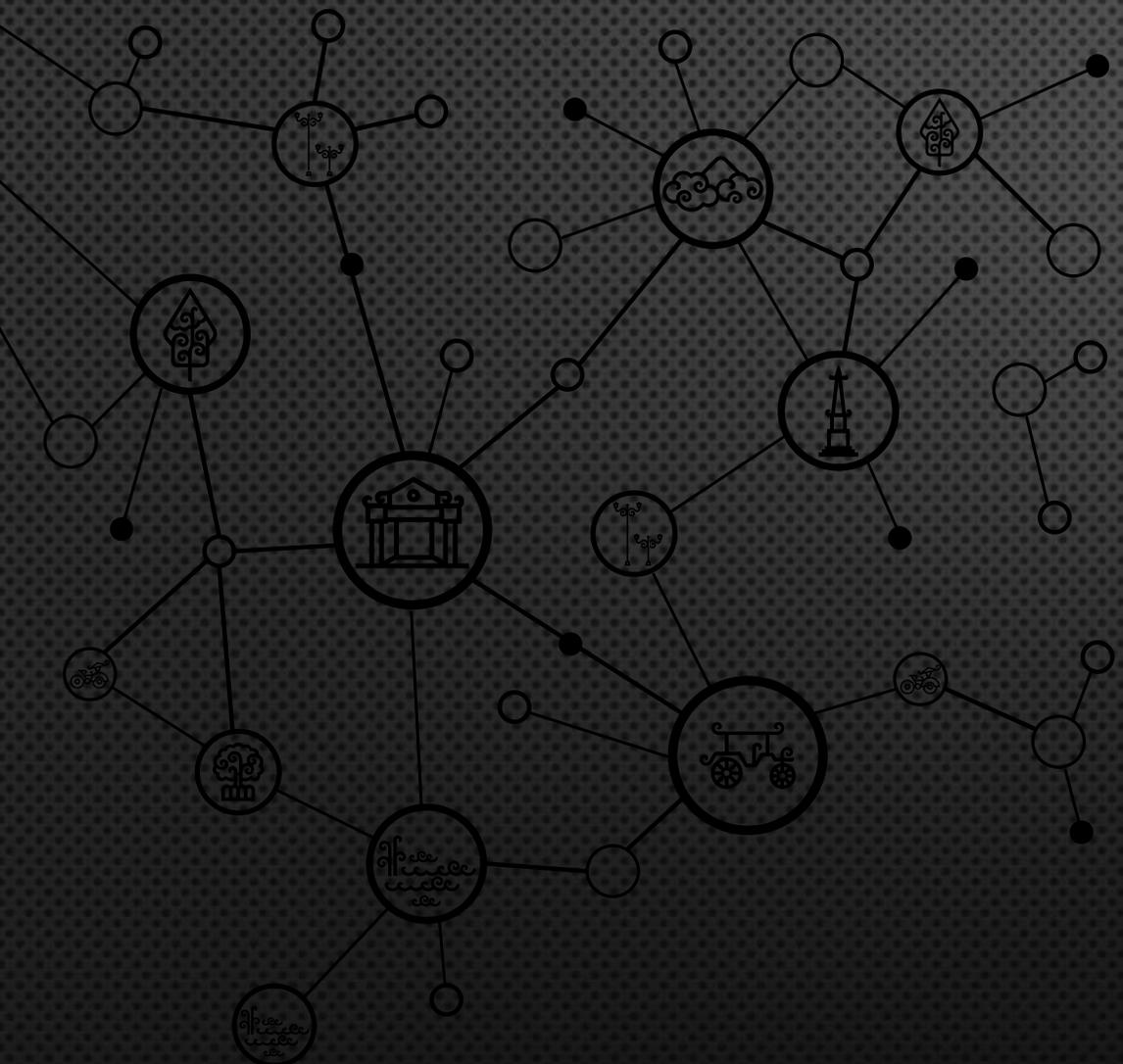
Keuangan Fisik

- Pagu danais, setiap tahun terus meningkat
- Perlunya percepatan kegiatan danais, yang diikuti dengan pertanggungjawaban keuangan



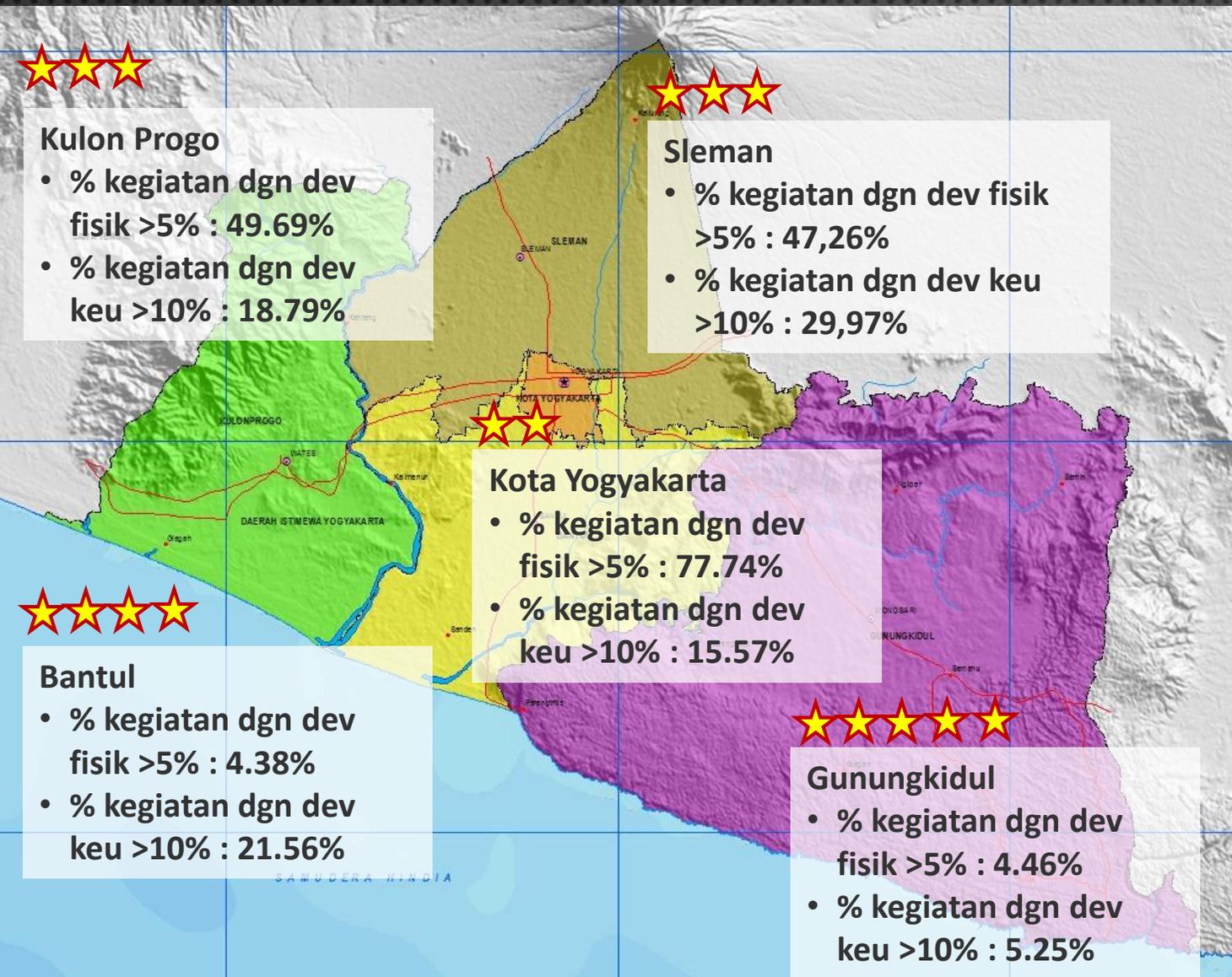
## Catatan Khusus Untuk Pelaksanaan Tahun 2019

- Lakukan pelaksanaan lelang PBJ sedini mungkin, terutama yang konstruksi (gedung PKK, pembangunan taman budaya Gunungkidul, Gedung Pameran Sonobudoyo, dll)
- Pastikan pelaksanaan kegiatan dilakukan seoptimal mungkin; hindari penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun
- Pelaksanaan kegiatan harus mampu mendorong pencapaian sasaran program hingga sasaran OPD/Instansi
- Mengingat masa berlaku **IPL** untuk pengadaan tanah JJLS Segmen Jeruk Wudel segera habis masa berlakunya, maka perlu dilakukan percepatan penyelesaian pengadaan tanah
- Tanda bukti hak atas tanah JJLS yang belum terselesaikan agar segera diselesaikan

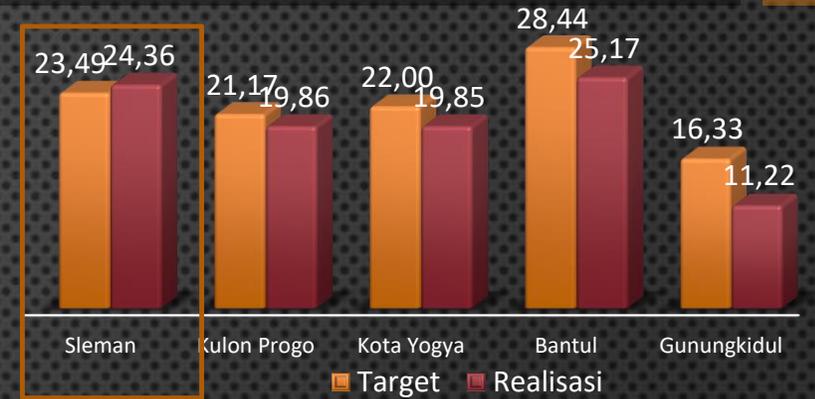


# Kinerja Kabupaten/Kota

# Capaian Fisik & Keuangan APBD Kabupaten/Kota



KINERJA FISIK :



KINERJA KEUANGAN :

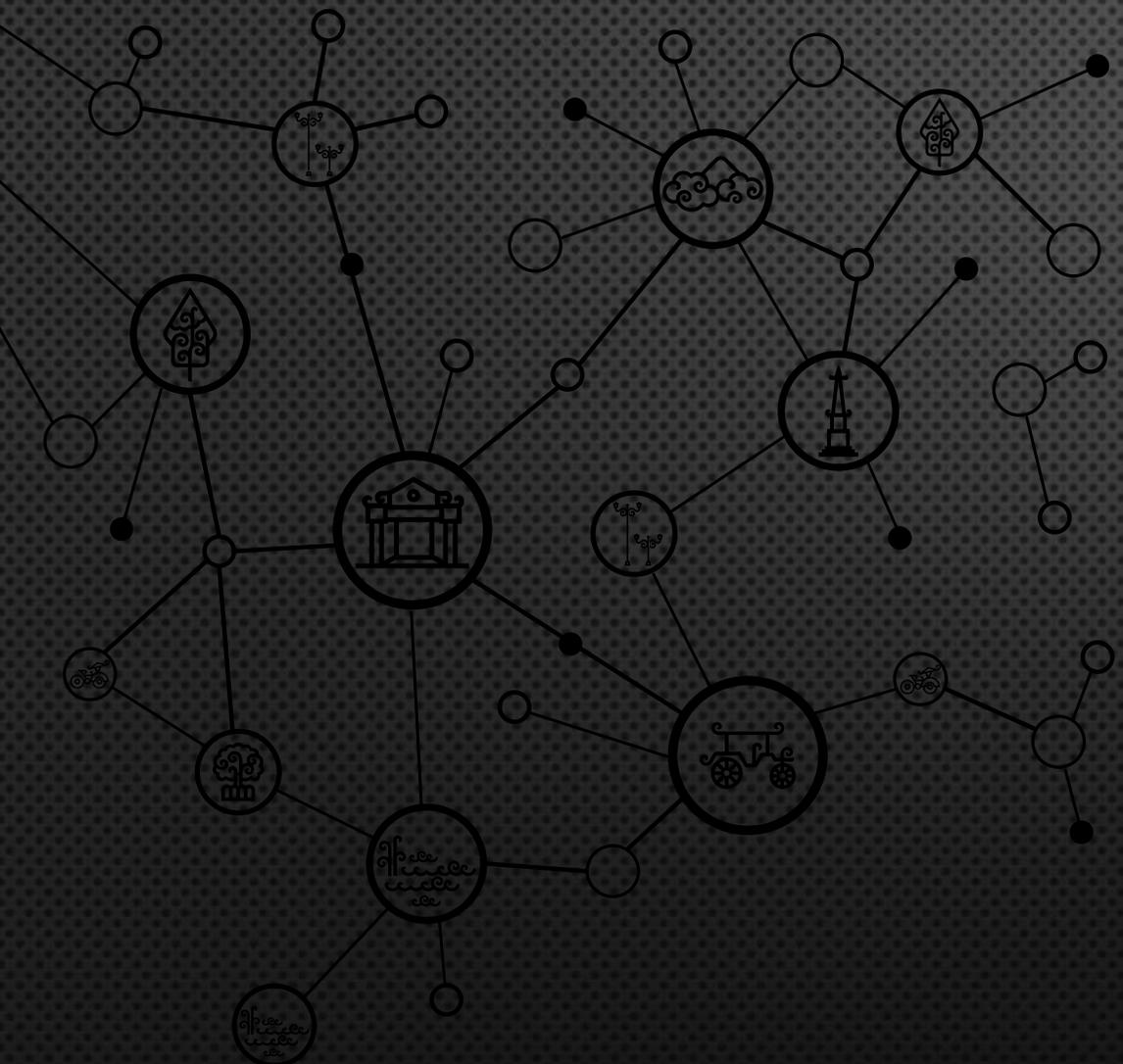


- **Sleman** menjadi satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki deviasi kinerja fisik (dengan catatan masih ada 47,26% keg yg memiliki deviasi fisik >5%), meskipun 4 kab/kota lainnya kinerja fisiknya memiliki deviasi yang cukup rendah
- Adapun deviasi keuangan yang >5 %, ditemui pada **Kota Yogyakarta**; sedangkan 4 kab/kota lainnya memiliki deviasi keuangan yang relatif stabil ( $\leq 5\%$ )



## Catatan Umum Terhadap Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

1. Keterlambatan SPj masih menjadi kendala dominan yang merata pada kabupaten/kota dalam pengelolaan anggaran, sehingga diperlukan penataan aliran kas yang tepat dengan realisasi kegiatan
2. Perlunya percepatan proses lelang, terutama terhadap paket jasa konstruksi yang cenderung terlambat pada sejumlah kabupaten (terutama Gunungkidul, Sleman, & Bantul) pasca terbitnya Permen PU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
3. Terhadap Kab. Kulon Progo dan Kab. Gunungkidul yang berperan sebagai PA dalam pengelolaan dana keistimewaan, diharapkan segera merealisasikan kegiatan keistimewaan 2019 sesuai target
4. Perlunya Kabupaten/kota mengonsolidasikan upaya penurunan kemiskinan pada wilayahnya masing-masing, melalui keterpaduan intervensi dari para pihak (Pemerintah, Pemda, Pemkab, Koordinasi TKPKD, Swasta, Masyarakat, CSR), termasuk melaksanakan kegiatan BKK seoptimal mungkin (Program Keluarga Harapan, Padat Karya Infrastruktur, Jambanisasi)

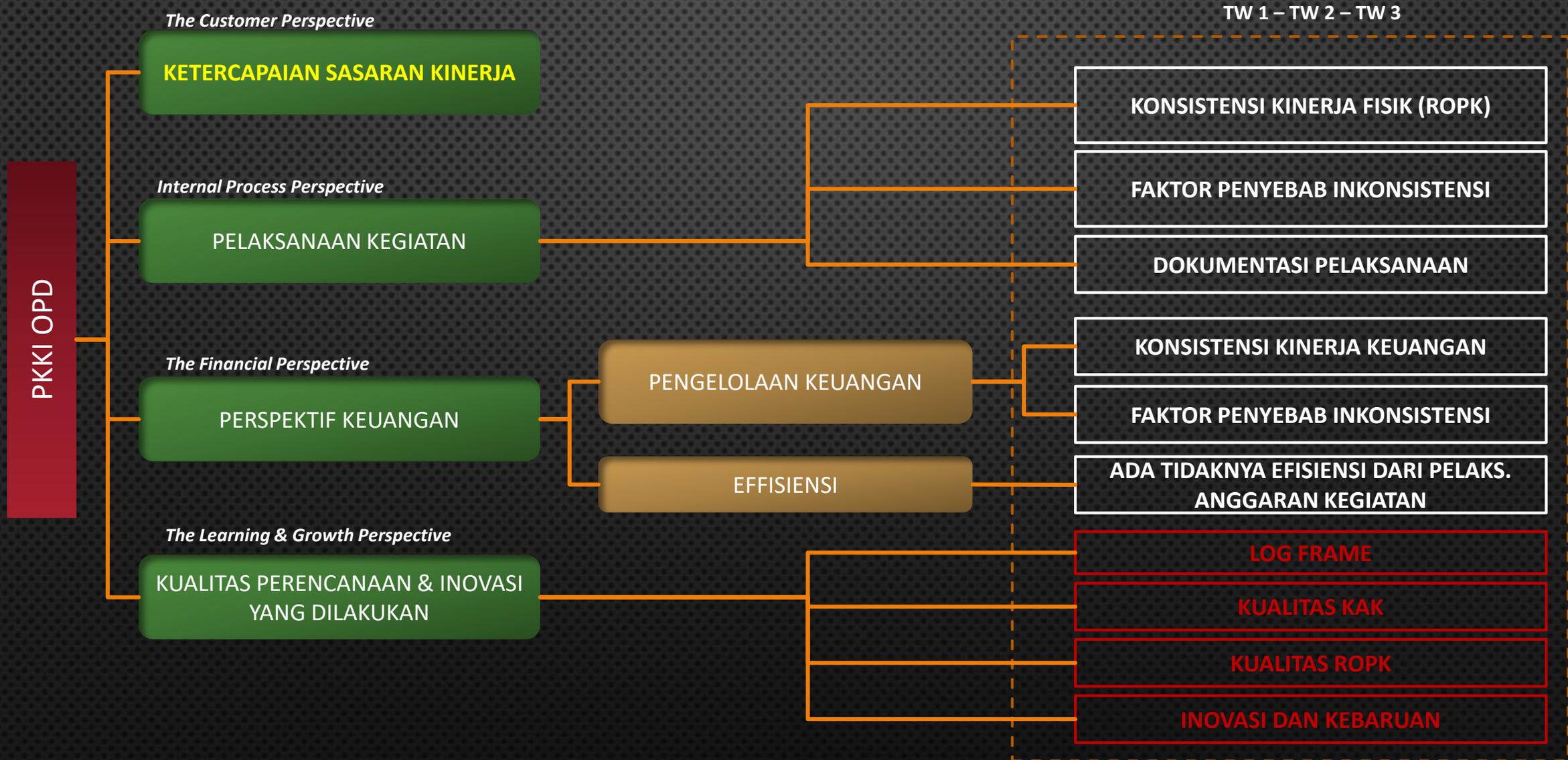


# Kinerja Pelaksanaan Kegiatan OPD Triwulan I TA 2019

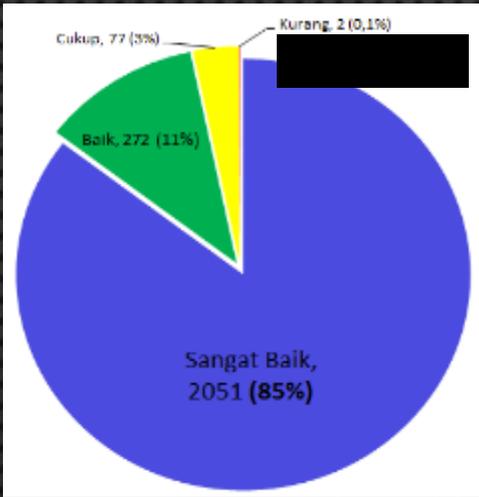


# Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi (PKKI)

Berbasis Pada Empat Pilar BSC → Konsep PKKI Tahun 2019

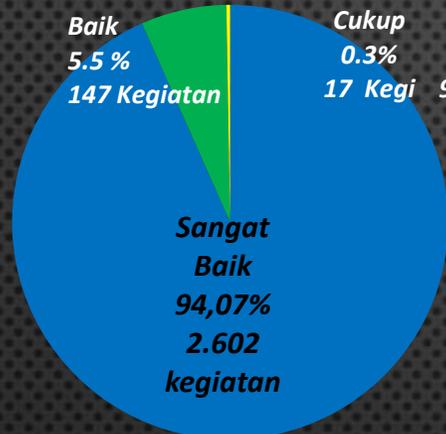


# Kondisi Kinerja PKKI Selama 2015-2018/2019



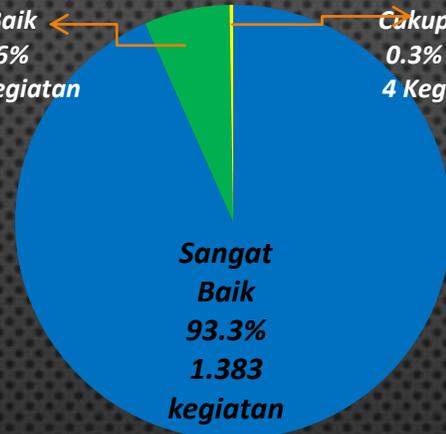
2015

SANGAT BAIK : 85 %  
 BAIK : 11 %  
 CUKUP : 3 %  
 KURANG : 1 %



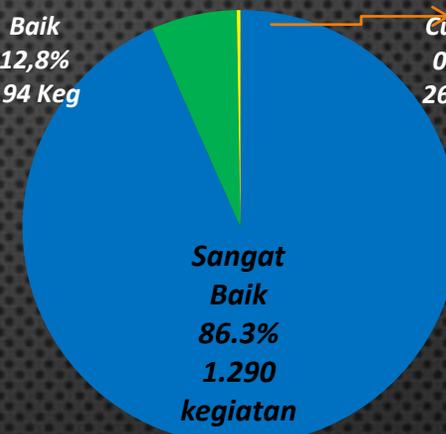
2016

SANGAT BAIK : 94,07 %  
 BAIK : 5,5 %  
 CUKUP : 0,3 %  
 KURANG : 0,1 %



2017

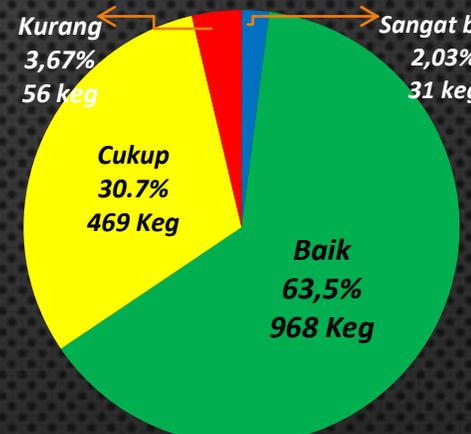
SANGAT BAIK : 93,3 %  
 BAIK : 6,4 %  
 CUKUP : 0,3 %  
 KURANG : -



2018

SANGAT BAIK : 86,3 %  
 BAIK : 12,8 %  
 CUKUP : 0,9 %  
 KURANG : -

SKEMA PENILAIAN BARU (BSC YANG DISESUAIKAN)



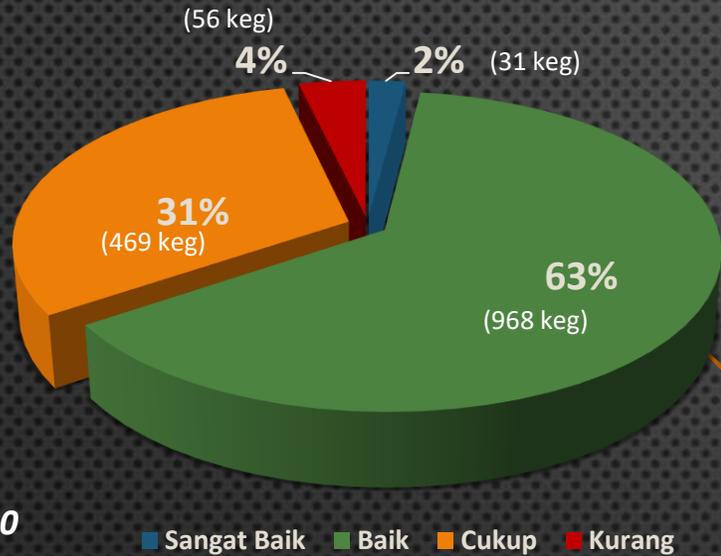
2019

SANGAT BAIK : 2,03%  
 BAIK : 63,52 %  
 CUKUP : 30,77 %  
 KURANG : 3,67 %

## PERLU PENINGKATAN SECARA KUALITATIF

- Untuk capaian TW 1 Tahun 2019, kinerja PKKI memiliki perbedaan dengan kinerja pada periode sebelumnya. Kinerja PA/KPA dominan kategori hijau (baik), meskipun pada tahun-tahun sebelumnya cenderung biru (sangat baik). Mencermati hal ini, OPD diharapkan segera meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan daerah

## Proporsi Kinerja Kegiatan Triwulan I 2019\*:



## Perbandingan Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2017 -2019



\*) Berdasar self assesment & Timbal Balik 8-10 April 2019

■ Sangat Baik ■ Baik ■ Cukup ■ Kurang

## PKKI Tw. 1 Tahun 2019

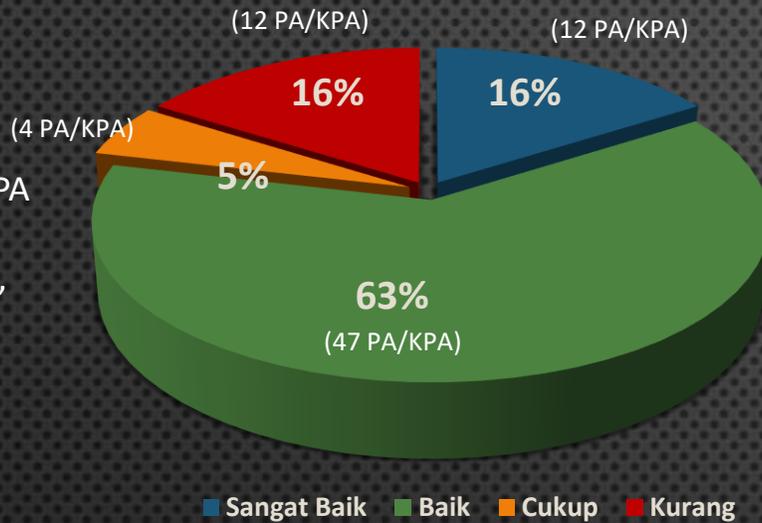
- Sebanyak 63% (968 keg) kinerja kegiatan pada TW I 2019 memiliki kinerja **BAIK**
- Masih ditemui 4% (56 kegiatan) dengan kinerja **KURANG**



# Proporsi Hasil Penilaian Kualitas Perencanaan & Inovasi

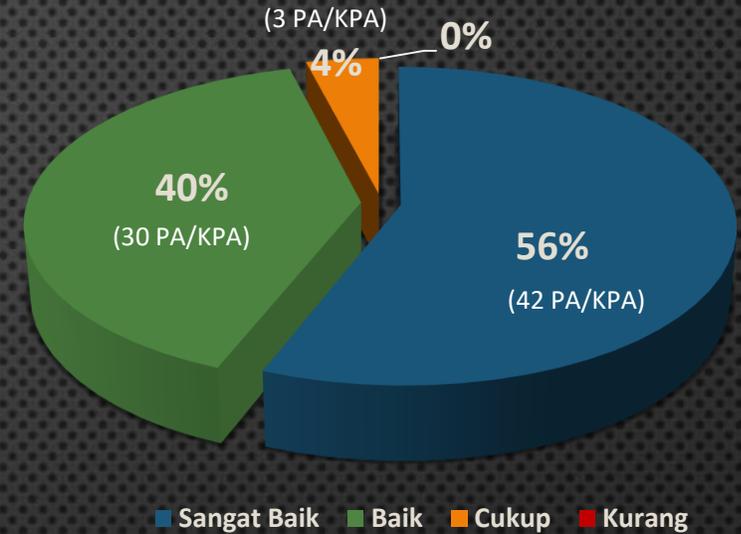
## LOGFRAME

Sebanyak 63% PA/KPA sudah mampu menyusun logframe, meskipun masih terdapat 16% OPD yang memiliki skor kurang



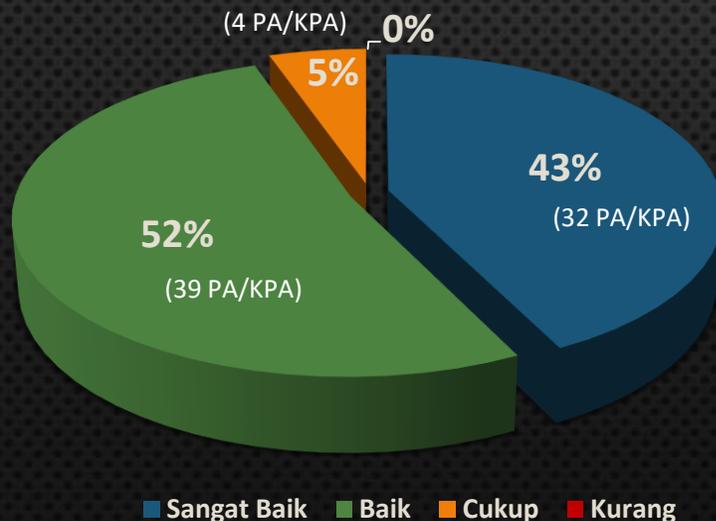
## KAK

Sebagian besar PA/KPA sudah dapat menyusun KAK dengan optimal



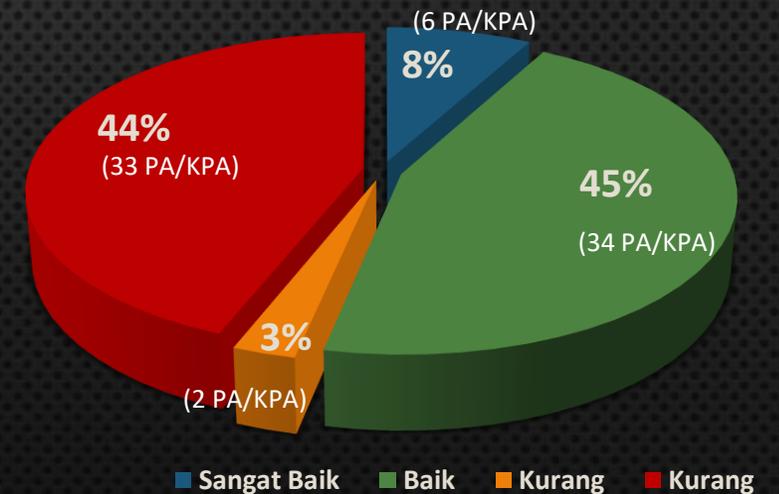
## ROPK

Sebagian besar PA/KPA sudah dapat menyusun ROPK dengan optimal



## INOVASI

Sebanyak 44% PA/KPA belum mampu menyajikan inovasi kegiatan





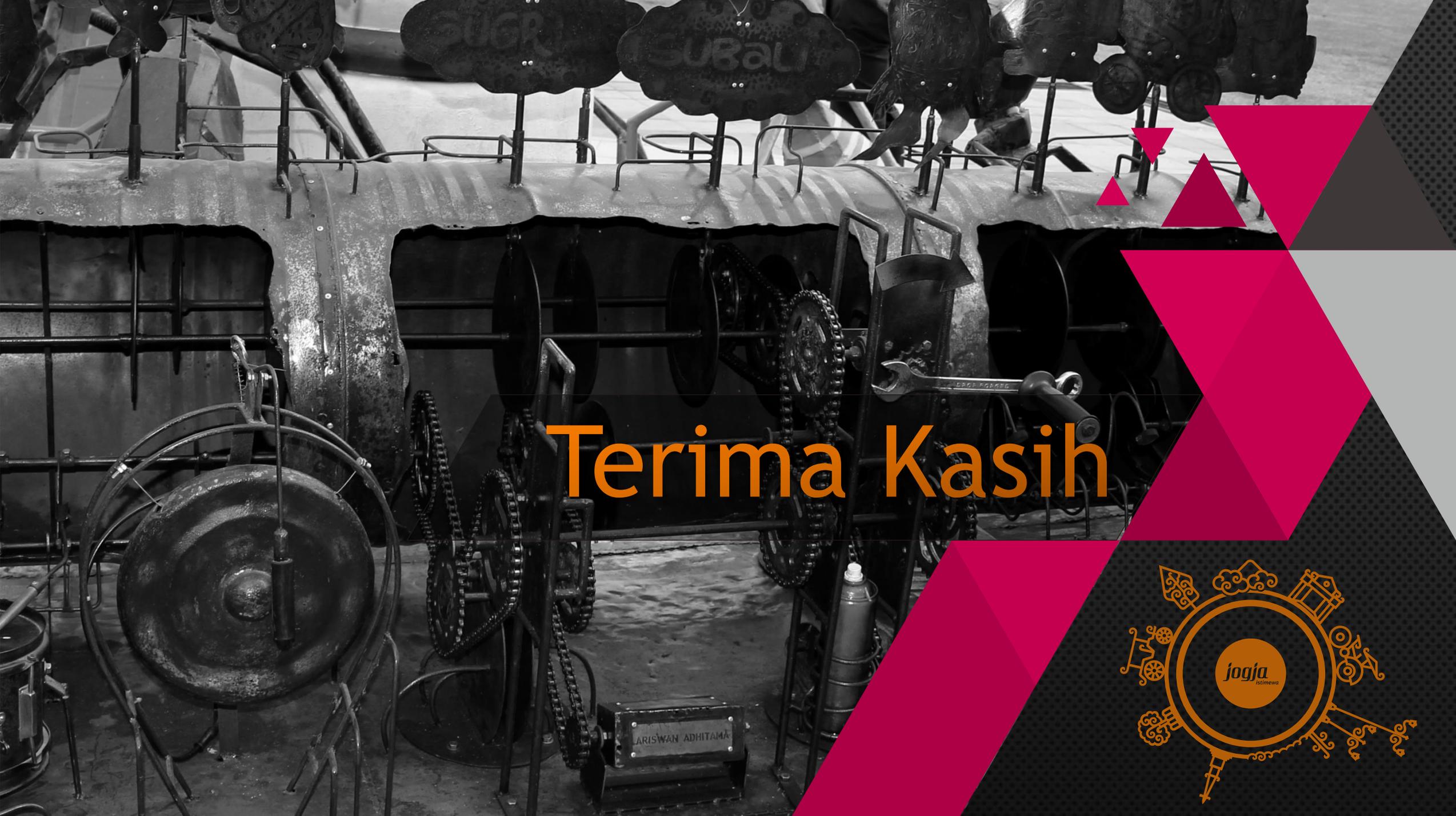
dengan **Sakip**  
Melangkah Pasti Wujudkan  
**Mimpi**



*Bahan Perenungan  
Bagi ASN DIY*



Ojo Mbrebegi  
Ananging Ngrampunggi



Terima Kasih

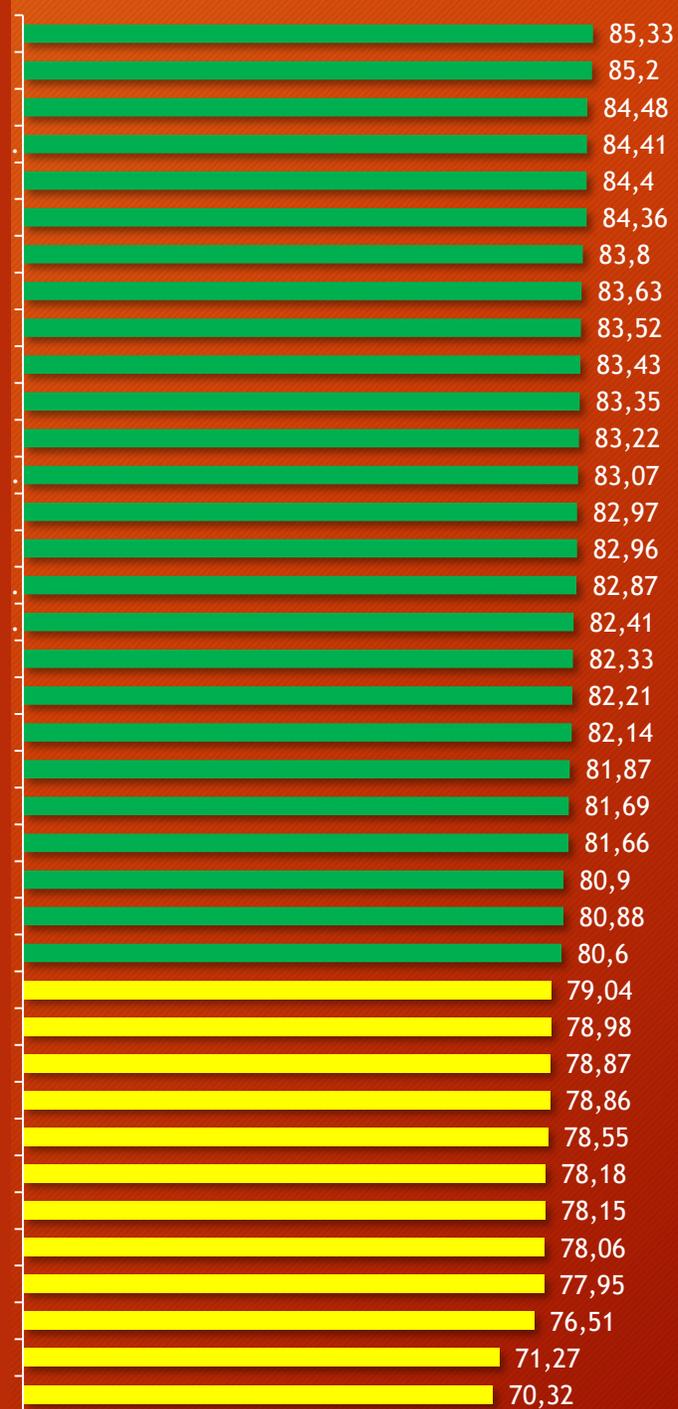


ARISWAN ADHITAMA

**Nilai Akhir PKKI**  
Kegiatan OPD Triwulan 1 Tahun 2019



# Dinas Kelautan dan Perikanan

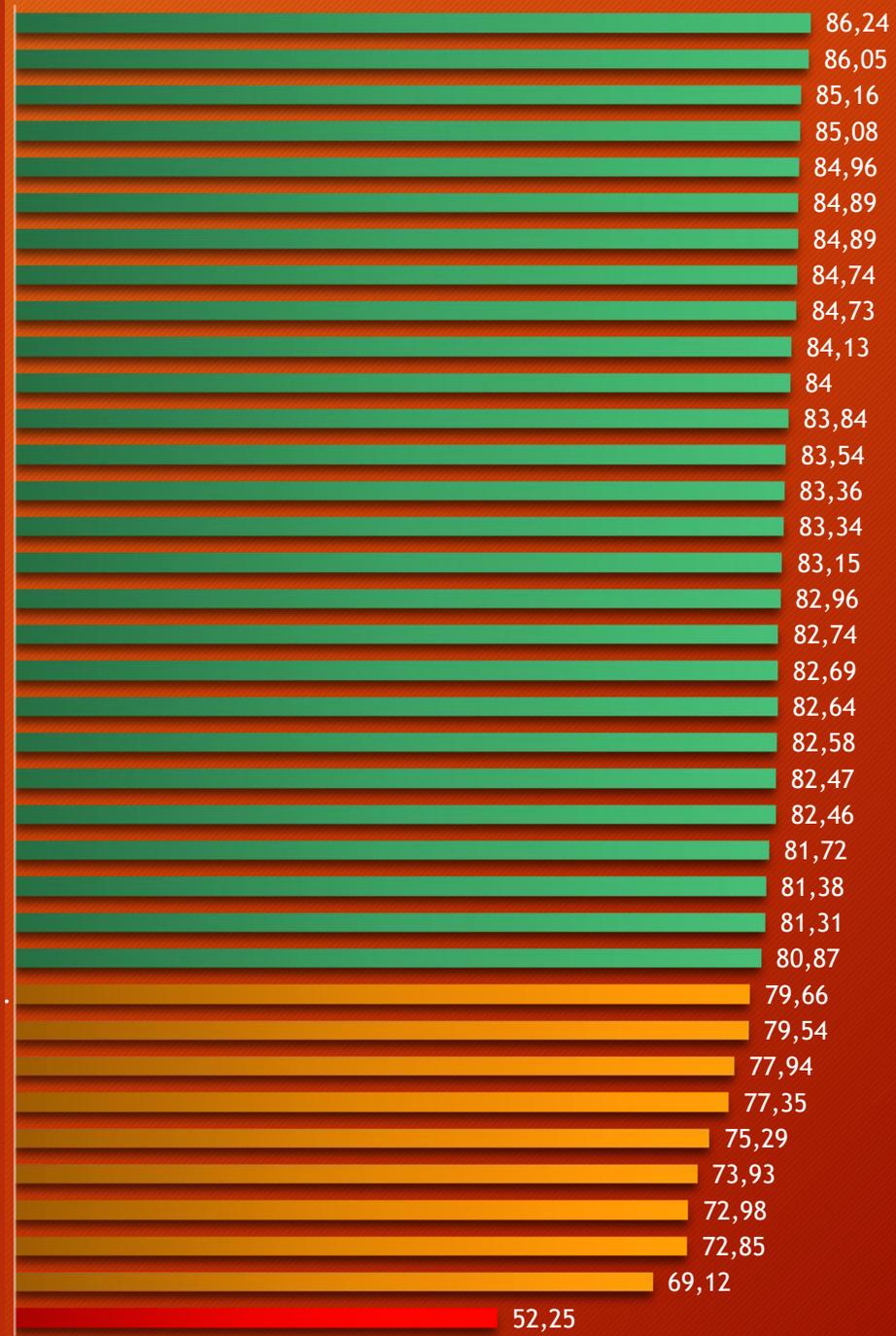


Kinerja  
Total

Es. II

# Dinas Kebudayaan

# Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak



Kinerja  
Total  
**Es. III**

# Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan